

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018-2023

URUSAN PEMERINTAH
 YANG DILAKSANAKAN
 TUGAS POKOK

: Fungsi lainnya.
 : Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Sumber Daya ASN bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

FUNGSI

: a. Pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
 b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
 d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah;
 e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
 f. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Tujuan :		

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian kinerja Perangkat Daerah agar terwujud kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang baik. • Formulasi Pengukuran : Jumlah target IKU perangkat daerah yang tercapai dibagi Jumlah Target IKU perangkat daerah dikali 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
<i>Sasaran :</i>		
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan di bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis Formulasi Pengukuran : Jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan dibagi jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak OPD yang capaian realisasi pelaksanaan APBD sesuai dengan target RKO. Indikator ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat tercapainya kesesuaian antara target dan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jateng. • Formulasi Pengukuran : Jumlah Indikator kinerja kegiatan APBD yang tercapai dibagi jumlah seluruh Indikator kegiatan APBD dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	Persentase tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penyelesaian kegiatan pada kab/kota yang dibiayai melalui pengendalian bantuan keuangan. Indikator ini penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada kab/kota. • Formulasi Pengukuran : Jumlah persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100%. • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan OPD dalam melaporkan pelaksanaan APBD dan ketepatan kab/kota dalam melaporkan pelaksanaan bantuan keuangan. • Formulasi Pengukuran : Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota yang melakukan pelaporan pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan sesuai kaedah dibagi Jumlah OPD dan Kabupaten/Kota dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset OPD dalam pelaksanaan APBD • Formulasi Pengukuran : Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang tercapai sesuai target dibagi seluruh Jumlah IKU Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset dikali 100% • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah